

**PROSES PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) PADA MATA
PELAJARAN EKONOMI KELAS X DI SMA SEKECAMATAN
LUBUK KILANGAN KOTA PADANG**

Sri Wahyuni, *Desi Areva, dan Lovelly Dwindi Dahen
Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat
*Email: da@gmail.com

Submitted: 20-07-2015, Rewiewed: 20-07-2015, Accepted: 22-07-2015
<http://dx.doi.org/10.22216/jit.2014.v8i3.6>

Abstract

This study aims to look at how the process of determining the minimum completeness criteria (KKM) High School districts namely Lubuk Kilangan 14 SMA N SMA Semen Padang and Padang and What are the obstacles faced in the Determination of minimum completeness criteria (KKM). This study uses kualitatif. This research informants are teachers, principals, and representatives of the existing curriculum at the high school and high school N 14 Semen Padang Padang using Snawball sampling. Data were collected using observation, interview and documentation. The results of the study found: Minimum completeness criteria setting process (KKM) is: Principal KKM has set a minimum that must be achieved by the subject teachers, Having known the value of the minimum KKM subject teachers at a workshop convened to determine the KKM for Economic Subjects class X which starts from Standard competence, basic competence to later demoted to the indicator. So after KKM determined subject teachers reported the results of the meeting to the representative of the curriculum, the curriculum report to the Vice Principal, principal chief engineer reported the results to the Department of Education and to the Office of Padang province, then disseminated to students and parents in the form of student learning lembarhasil. While the obstacles encountered in the determination of this KKM is: Time penentuan KKM is not planned in accordance with the existing circumstances, When the teacher determines the minimum value of completeness (KKM) is too high then the students do a lot of remedial, When the teacher determines the minimum value of mastery is too low then the student will difficult to get into college.

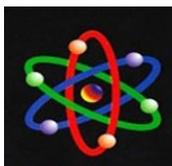
Keywords: *Determination Process KKM, KKM Determination Constraints*

PENDAHULUAN

Usaha untuk meningkatkan mutu guru merupakan satu langkah yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan tidak terlepas dari meningkatkan mutu

guru. Guru harus dibekali dengan berbagai pengalaman teoristis maupun pengalaman praktis yang harus dilaksanakan secara terpadu.

Selain meningkatkan mutu guru usaha yang juga dilakukan pemerintah adalah melakukan penyempurnaan kurikulum, perubahan kurikulum dilakukan disemua jenjang pendidikan mulai TK,



SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi dan diharapkan peserta didik memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Dalam Kurikulum 2004 dan KTSP siswa dituntut untuk berperan aktif dan memahami materi pelajaran serta mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

Sehubungan dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah, pendekatan dalam pembelajaran yang dilakukan guru juga berubah, salah satunya dengan menetapkan prinsip belajar tuntas. Menurut Sadirman (2001:167), dalam proses belajar mengajar tentu saja dikandung suatu harapan agar seluruh atau setidaknya sebagian besar siswa dapat berhasil dengan baik, namun kenyataan sering tidak demikian, salah satu usaha untuk mencapai hal itu adalah dengan mengembangkan prinsip belajar tuntas atau *mastery learning*. Oleh karena itu tiap kompetensi dasar (KD) materi pelajaran, ditetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Salah satu prinsip pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal (Sudrajat, 2008:3)

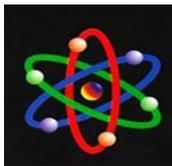
KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai, sebarangpun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus atau tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria mengharuskan pendidikan untuk melakukan tindakan yang tetap terhadap hasil penilaian yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas atau layanan pengayaan bagi yang sudah

melampaui KKM. KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama.

Penetapan KKM dilakukan dengan berpedoman kepada kriteria yang ditetapkan oleh Depdiknas. Kriteria tersebut adalah kompleksitas materi, daya dukung sekolah dan intake (kemampuan) siswa. Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan harus selalu dipedomani oleh guru dalam menetapkan standar ketuntasan. Hal ini bukanlah suatu yang mudah, dimana guru harus benar-benar memahami ketiga kriteria tersebut serta mempunyai kompetensi dalam menetapkan KKM. Adanya kriteria penetapan KKM tiap sekolah ini akan berbeda.

Begitu juga halnya yang dilakukan oleh guru-guru ekonomi kelas X SMA yang ada di kecamatan Lubuk kilangan Kota Padang. Dalam menentukan KKM banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dari sisi kompleksitas, daya dukung dan intake siswa. Di Kecamatan Lubuk kilangan terdapat dua sekolah yaitu SMAN 14 Padang, dan SMA Semen Padang. Dari kedua sekolah ini terdapat satu SMA Negeri dan satu SMA swasta, dan kedua sekolah tersebut dalam penetapan KKM terdapat perbedaan. Dalam Penentuan KKM kedua sekolah ini mempunyai perbedaan yang dilihat dari kompleksitas, daya dukung dan intelek siswa. Dari Observasi yang penulis lihat dilapangan antara Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta mempunyai perbedaan dalam penetapan KKM dimana Di SMA 14 KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran ekonomi kelas x yaitu 75 dan di SMA Semen Padang nilai KKM yang ditetapkan 80.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah:



1. Bagaimana proses dalam penetapan KKM pada mata pelajaran ekonomi KELAS X di SMA di Kecamatan Lubuk kilangan, Kota Padang?
2. Apa sajakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam penetapan KKM?

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses dalam suatu kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu memahami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan kelakuan (Hamalik, 2001:27).

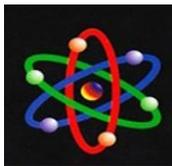
Menurut (sadirman, 2011: 21) Belajar merupakan usaha mengubah tingkah laku, belajar akan membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu, pengertian, harga diri, minat, watak, dan juga penyesuaian diri. Berkaitan dengan hal ini Slameto (2003:2), menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Sunhaji (2009:37) menyatakan kegiatan pembelajaran adalah suatu aktivitas untuk mentransformasikan bahan pelajaran kepada subjek belajar, guru berperan sebagai penjabar, penejemah bahan supaya materi pelajaran tersebut dimengerti siswa. Berbagai upaya dalam strategi dilakukan guru supaya bahan atau materi pelajaran tersebut dapat dengan mudah dicerna oleh subjek belajar, yakni tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskannya

Menurut Suryasubroto (2002:96) belajar tuntas adalah satu filsafat yang menyatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang tepat, semua siswa dapat belajar dengan hasil yang baik dan hampir seluruh materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dipandang dari sudut pendidikan pembelajaran dengan menggunakan prinsip belajar tuntas sangatlah menguntungkan siswa, karena dengan cara tersebut setiap siswa dikembangkan semaksimal mungkin. Pandangan yang menyatakan semua siswa dapat belajar dengan hasil yang baik juga akan mempunyai imbas pada pandangan bahwa semua guru dapat mengajar dengan baik, oleh karena itu mengenai belajar tuntas perlu untuk dimantapkan.

Menurut Sadirman (2011:167) belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengharapkan sebagian besar siswa dapat menguasai instruksional umum (*basic learning objektif*) dari suatu satuan unit pelajaran secara tuntas. Pengembangan model pembelajaran tuntas terutama dilandasi oleh pokok-pokok pikiran dalam psikologi behavioristik yang menitik pembentukan tingkah laku dan menggunakan pola belajar individual sebagaimana halnya paket belajar atau sistem modul.

Kriteria ketuntasan menunjukkan presentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orangtua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan



sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan orang tuannya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar (LBH) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik (Depdiknas, 2008:3).

Anonimus (2008:6), penetapan KKM berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan, kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tingkat kompleksitas, kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, 2) Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah, 3) Tingkat kemampuan (Intake) rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih dengan pertimbangan, bahwa penulis mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa dan kejadian dalam lingkungan yang alami, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles (2000:37): bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang fenomena tengah berlangsung. Informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi yang mengajar di SMA di kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dengan menggunakan teknik bola salju (*snow ball*) dimulai dari informan pertama (guru ekonomi) dan terus keinforman selanjutnya yaitu kepala sekolah, Wakil Kurikulum sampai tidak diperlukan lagi informan-informan lain.

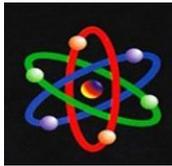
Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka data yang dikumpulkan

dianalisis secara kualitatif baik data primer maupun data skunder, dengan melakukan tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, diketahui bahwa proses penentuan KKM antara SMA semen Padang dan SMAN 14 Padang terdapat perbedaan dalam penentuan KKM ada beberapa proses yang harus dijalani sekolah dalam menetapkan KKM. Tiap sekolah mempunyai beberapa perbedaan dalam penetapan KKM. Dimana proses penentuan KKM di SMA Semen Padang dimulai dengan penentuan oleh kepala sekolah nilai minimum yang harus ditetapkan oleh guru, diadakan oleh rapat oleh guru mata pelajaran pada acara loka karya, setelah didapatkan KKM oleh guru mata pelajaran maka guru melaporkan ke wakil kurikulum, wakil kurikulum melaporkan kepada kepala sekolah, kepala sekolah melaporkan ke Dinas

Pendidikan Kota Padang dan ke Dinas Pendidikan Propinsi. Sedangkan pada SMA 14 Padang dalam penentuan KKM guru mengadakan rapat loka karya atau rapat KKG, setelah didapatkan KKM dari hasil rapat guru maka guru melaporkan ke wakil kurikulum, wakil kurikulum melaporkan ke pada kepala sekolah, kepala sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Padang dan Dinas Pendidikan Propinsi. Antara SMA semen Padang dan SMAN 14 Padang dalam penentuan KKM SMA Semen Padang telah mendapatkan instruksi dari kepala sekolah sedangkan SMAN 14 Padang guru langsung mengadakan rapat untuk penentuan KKM.



Hal ini berbeda menurut Anonimus (2008) dalam proses penetapan KKM yaitu: Guru atau kelompok guru menetapkan KKM pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek criteria, yaitu kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik, Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian, KKM yang ditetapkan disoialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: peserta didik, orang tua dan Dinas pendidikan. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penelitian dilaporkan kepada orangtua/ wali peserta didik.

Dari segi persentase yang didapatkan oleh SMAN 14 Padang bahwa nilai kompleksitas, intake siswa dan daya dukung mendapatkan nilai sedang yaitu 65 sampai 79 dikategorikan sedang. Pada semester satu kompleksitas dari nilai KKM SMAN 14 Padang yaitu: 75,96 dan semester dua 75,41 dikategorikan sedang. Pada intake siswa pada semester satu dan dua terdapat nilai KKM 75 dan Pada daya dukung untuk semester satu 76,81 dan semester dua 77,4 dikategorikan sedang. Dari ketiga kategori yang ada nilai tertinggi diperoleh oleh SMA 14 Padang terdapat pada Daya dukung yaitu 76,81 dan 77,4.

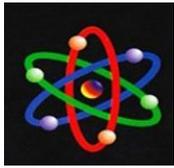
Persentase dalam penetapan KKM oleh SMA semen padang langsung ditentukan dua semester dimana semester satu dan semester dua nilai kompleksitas yang diperoleh adalah 75,9 dikategorikan nilai sedang, untuk intake siswa nilai atau skor yang diperoleh adalah 84 dikategorikan nilai tinggi, dan sedangkan untuk daya dukung skor yang diperoleh adalah 79,9 dikategorikan nilai sedang.

Dari ketiga skor yang ada nilai tertinggi terdapat pada intake siswa dimana nilai yang

diperoleh adalah 84. Sedangkan dalam penerimaan siswa untuk SMA semen Padang berpatokan pada nilai rapor SMP yang diperoleh siswa Semen Padang. Karena dalam penerimaan siswa pada SMA semen Padang semua siswa yang SMP pada semen Padang maka akan diterima di SMA semen Padang tanpa dilakukan tes.

Dari dua SMA yang ada di Lubuk Kilangan diatas terdapat perbedaan skor yang diperoleh dalam mata pelajaran Ekonomi setiap kategori yang ada. Dimana skor tertinggi diperoleh oleh SMA Semen Padang yaitu 80 dengan kategori tinggi. Walaupun dia SMA swasta tapi dia bisa mengungguli SMA negeri yang ada di Lubuk Kilangan yaitu SMAN 14 adang yaitu 75 dengan kategori sedang . Pada Semester satu dan semester dua pada Tahn Ajaran 2013/2014 nilai KKM Ekonomi kelas X yang diperoleh SMA 14 Padang adalah 75. Sedangkan untuk SMA Semen Padang nilai KKM Ekonomi kelas X yang diperoleh untuk semester satu dan dua tahun ajaran 2013/2014 adalah 80. Dengan nilai kompleksitas 75,96 kategori sedang, intake siswa nilai yang diperoleh Dimana kompleksitas Nilai KKM yang ditentukan harus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Contohnya pada waktu kelas X nilai KKM ekonomi adalah 80 maka untuk kelas XI nya harus diatas 80. Hal ini sejalan dengan pendapat (Anonimus:2008) dalam penetapan KKM harus melihat hasil penetapan KKM sebelumnya.

Menurut Anonimus (2008) Penetapan KKM oleh guru ataupun sekolah harus tetap berpedoman pada kriteria penetapan KM yang telah dikeluarkan oleh Depdiknas, karena tiap sekolah diberikan kebebasan untuk menetapkan KKM, oleh karena itu akan terdapat perbedaan KKM di sekolah yang berbeda. Menurut Anonimus(2008:3) Perbedaan penetapan



KKM pada tiap sekolah, menyebabkan peranan guru semakin besar. Pada hakekatnya, factor utama keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan mengatakan bahwa kualitas kemampuan guru yang rendah akan berdampak pada rendah mutu pendidikan. Dalam menetapkan KKM, guru dituntut untuk dapat menetapkan KKM yang sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini bukanlah hal mudah, karena adanya perbedaan kemampuan siswa. Bukan hanya kemampuan siswa yang jadi masalah dalam menetapkan KKM.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penentuan KKM oleh SMA Semen Padang dan SMAN 14 Padang adalah: Alokasi waktu yang direncanakan tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, dalam penentuan KKM bila terlalu rendah maka siswa akan sulit bersaing untuk masuk SMPTN dan apa bila KKM terlalu tinggi maka siswa akan banyak mendapatkan remedial.

Jadi dalam penentuan KKM harus sesuai dengan keadaan sekolah baik dari tingkat kerumitan materi, daya dukung dan intake siswa harus sesuai dengan fakta yang ada. Karena kalau tidak sesuai dengan keadaan maka siswa akan kesulitan dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN

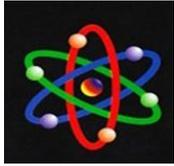
Dari paparan data dan hasil penelitian serta pembahasan pada Bab VI sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan proses penilai Krteria ketuntasan Minimum (KKM) antara SMA Semen Padang dan SMA 14 Padang.

2. Dalam menentukan kriteria ketuntasan minimum (KKM) ,pada SMA Semen Padang KKM Mata pelajaran Ekonomi Kelas X yaitu 80 dimana Ko
3. Dalam penetapan KKM ada kendala-kendala yang dihadapi oleh sekelompok guru mata pelajaran yaitu: waktu yang direncanakan tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, dalam penentuan KKM bila terlalu rendah maka siswa akan sulit bersaing untuk masuk SMPTN dan apa bila KKM terlalu tinggi maka siswa akan banyak remedial.
4. Berdasarkan kesimpulan yang telah dicantumkan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan:
5. Dalam penetapan KKM diharapkan kepada guru menetapkan sesuai dengan prosedur yang ada. Supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
6. Kepada Dinas pendidikan supaya melakukan pemantauan apakah penetapan KKM itu sesuai dengan prosedur yang ada.
7. Kepada guru diharapkan dalam penentuan KKM harus bersifat objektif.
8. Dalam penentuan KKM dari tiga komponen yang ada sebaiknya mempunyai standar nilai kapan dikatakan tinggi, sedang dan rendah

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2008. Manajemen Peningkatan Kualitas Sumber Daya Guru Sebuah Pengantar. Istana ilmu.
- Depdiknas. 2008. Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Bandung: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.



- Miles dan Huberman. 2000. Analisis data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Pustaka setia.:Bandung
- Sardiman M. 2011. Interaksi Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryasubroto.2002. Proses Belajar Mengajar Disekolah. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunhaji. 2009. Strategi pembelajaran Konsep Dasar, Metode dan Aplikasi Dalam Proses Belajar Mengajar. Yogyakarta: Grafindo Literia Media.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta: Bandung